

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap kaum perempuan dalam banyak hal masih mengalami hambatan, meskipun telah banyak dihasilkan beberapa kesepakatan konvensi dan seruan-seruan yang bersifat internasional. Isu gender menjadi ajang pembicaraan dalam kerangka mengejar ketertinggalan kaum perempuan. Ketertinggalan kaum perempuan dalam segala hal, akan selamanya terjadi jika tidak ada upaya konkrit yang mampu mengatasinya.

Banyak upaya yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan kaum perempuan. Perempuan dinilai kurang dibanding dengan potensi kaum laki-laki, sehingga pendidikan merupakan program utama bagi perempuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Selain sektor publik juga kaum perempuan harus dipastikan mendapatkan akses ke pekerjaan yang lebih baik untuk meningkatkan aktualisasinya dalam bidang sosial ekonomi. Pemikiran ini melahirkan *Gender And Development (GAD)*, terobosannya adalah menekankan prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan, atau sebaliknya. Meskipun pendekatan ini diperdebatkan pada *The International Conference on Population and Development (CPD)* di Cairo Tahun 1994 dan *The 4th World Conference of Women*, di Beijing Tahun 1995, namun ada hal yang disepakati berupa adanya komitmen operasional tentang peningkatan status dan

peran perempuan di dalam hukum dan pembangunan, mulai dari tahap perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan hingga menikmati hasil-hasil pembangunan (Murniati, 2007:11).

Pemahaman persamaan gender perlu mendapat perhatian, karena realitas masih terdapat ketidakadilan terhadap perempuan yang disebabkan hal-hal berikut : 1) karakteristik fisik dan reproduksinya perempuan lebih rentan sebagai korban kekerasan (seksual, perkosaan, penghamilan paksa, kawin paksa), 2) dengan relasinya kepada laki-laki, maka pemaknaan sosial dari perbedaan biologis menimbulkan mitos, stereotip, norma, praktek yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan, di lingkungan perempuan berada, 3) perempuan dijadikan bagian dari obyek ekonomi atau memanfaatkan keuntungan; pelacuran, perdagangan perempuan, pornografi atau umpan bisnis bagi oknum pelaku usaha, 4) kelemahan perempuan dimanipulasi menjadi aset dalam aktivitas bisnis, diupahi murah sebagai buruh pabrik yang berbeda dengan pria meskipun dengan tingkat produktivitas sama; atau menjadi guide untuk turis, menjadi media atraksi periklanan media massa (*model*);dll, 5) perempuan tidak pantas terlibat di dalam forum-forum terhormat seperti dalam bidang-bidang kehidupan (sosial, politik, budaya, agama) (Anugrah,2009: 2-3).

Meskipun telah bemunculan gerakan feminisme, namun dalam waktu yang berkepanjangan penderitaan perempuan masih saja terjadi di mana-mana di belahan dunia ini, terutama di negara-negara berkembang (Asia dan Afrika) (Anugrah, 2009:6). Hal demikian terefleksi dari Keprihatinan Beijing, yang

dirumuskan pada Konferensi Beijing Tahun 1995. Beberapa butir Keprihatinan Beijing, dapat kiranya dikemukakan relevan dengan bahasan ini adalah :

Masalah perempuan dan kemiskinan terutama disebabkan karena kemiskinan struktural, sebagai akibat dari kebijakan pembangunan dan sosial budaya yang berlaku, adanya keterbatasan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dalam meningkatkan posisi tawar, terbatasnya akses perempuan untuk berusaha di bidang ekonomi produktif, termasuk mendapatkan modal dan pelatihan usaha, keikutsertaan perempuan dalam merumuskan dan mengambil keputusan di dalam keluarga, masyarakat dan negara, masih sangat terbatas, pemahaman dan penafsiran agama yang salah dan bercampur aduk dengan budaya yang tidak berpihak terhadap perbaikan status perempuan, diskriminasi dalam kesempatan pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja, masalah kesehatan dan hak reproduksi perempuan yang kurang mendapat perlindungan dan pelayanan memadai.

Upaya – upaya untuk mengagregasi taraf hidup dan penghidupan perempuan sudah banyak dilakukan baik dalam bidang sosial budaya dan agama, politik serta dalam bidang hukum itu sendiri yang dapat melindungi hak-hak perempuan. Pentingnya pemahaman tentang hak-hak asasi manusia serta dengan perjuangan konsep *affirmative action* dengan lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD merupakan perkembangan yang cukup signifikan bagi kondisi feminisme di Indonesia dari prespektif hukum, karena selama ini tidak banyak instrumen hukum yang dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan secara ekspresis verbal, khususnya dari segi ketatanegaraan. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 berusaha keluar dari kesan hukum yang bersifat patriachat (Anugrah, 2009:1).

Bangsa ini harus terus berkembang, serta harus menempatkan kaum perempuan sejajar dengan kaum pria. Dalam tataran praktis dewasa ini, realisasinya sudah tidak ada pembatas secara tegas untuk mensplit baik tingkatan pendidikan dan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dan diraih oleh kaum perempuan, namun tetap saja bahwa kaum perempuan selalu dalam berbagai hal hanya sekedar pelengkap saja (sub ordinat) bukan merupakan penentu sebuah keputusan. Padahal perempuan tidak hanya harus diberi kesempatan yang sama dalam pendidikan, tetapi perlu pula berperan serta dalam kegiatan ekonomi dan mempunyai hak sipil yang sama dengan pria.

Demokratisasi Indonesia menuntut peran aktif dari segenap rakyat Indonesia, tanpa menilik peran gender. Bangsa ini memerlukan insan-insan politik yang tulus serta dengan segenap pemberdayaan yang maksimal dari individu-individunya. Sudah saatnya bangsa ini memerlukan sentuhan dingin kaum perempuan. Mengutip pendapat Abdullah (2001:27) bahwa perempuan dalam berbagai kasus lebih mobil dibandingkan laki-laki, lebih aktif dalam berbagai aktivitas jika terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Kajian ini diperlukan agar siswa sebagai warga negara hipotetik menyadari dan memahami serta pada akhirnya mencermati peranan perempuan dalam segala bidang kehidupan, bagaimana ia menjadi sumber devisa negara dari para Tenaga Kerja Wanita (TKW), bagaimana peran ibu rumah tangga yang tidak terlibat dalam bidang publik, juga apakah perempuan merasa beruntung atau dirugikan dalam keterlibatannya sebagai perempuan karier terutama dalam bidang politik. Membangun kesadaran ini harus dimulai sejak dini, agar mereka sebagai warga

negara tidak mengulang realitas yang ditentang oleh kaum feminisme Indonesia. Bahkan semua elemen dan komponen harus optimal dan maksimal mensejajarkan perempuan dengan para laki-laki untuk bersama-sama membangun negara yang berdemokrasi ini.

Dari sejumlah regulasi, hal yang paling mendasar adalah merefleksikannya dalam kegiatan pendidikan yang berdemokratis sebagai *key word* (kata kunci) dalam membangun kesadaran serta *mind set* masyarakat agar berkembang kesadaran laki-laki atas kemampuan perempuan dan akan memberikan peluang untuk membangun secara bersama-sama. Dengan demikian, kehadiran perempuan bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra kerja dan mesti saling membantu.

Ide mendasar tentang konsep persamaan ini dimunculkan Adler (1982) yang dikutip Suparno (1999:33) bahwa suatu negara yang demokratis setiap negara terlibat dalam pembangunan negara, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Bahkan John Dewey melihat adanya hubungan yang begitu erat antara pendidikan dan demokrasi. Dewey mengatakan apabila kita berbicara mengenai demokrasi maka kita akan memasuki wilayah pendidikan. Pendidikan merupakan sarana bagi tumbuh dan berkembangnya sikap demokrasi (Zamroni, 2007:46).

Untuk itu, maka perlu dikembangkan pendidikan demokrasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan/PKn (*Civic Education*) dengan menggunakan strategi menanamkan pengetahuan demokrasi yang dibarengi dengan memberikan perjalanan hidup berdemokrasi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Lickona

(Winataputra dan Budimansyah, 2007:171) bahwa para pemikir dan pembangun demokrasi, berpandangan bahwa pendidikan moral merupakan aspek yang esensial bagi perkembangan dan keberhasilan kehidupan demokrasi suatu bangsa.

Bertolak dari pemikiran di atas, sudah merupakan keniscayaan bahwa dalam pendidikan demokrasi tampak ada tuntutan kepada persekolahan untuk mentrasfer pengajaran yang bersifat akademis ke dalam realitas kehidupan yang luas di masyarakat. Dengan perkataan lain praktek pembelajaran dilakukan dengan materi yang substansial (konsep teori yang sangat selektif) tetapi kaya dalam implementasi. Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ke depan sebagai pendidikan demokrasi, tidak hanya sebatas mengembangkan warga negara yang demokratis, tetapi juga hendak mengembangkan pemberdayaan warga negara (*citizen empowerment*), memperkokoh nasionalisme dengan menekankan pendekatan *political nation* untuk melengkapi pendekatan lama yakni *cultural nation*. Pendidikan demokrasi melalui PKn difokuskan pada peletakkan dasar yang kokoh bagi berkembangnya *civil society* sebagai basis negara demokrasi (Sopiah, 2009:184).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pencerdasan bangsa, yang tertuang dalam Tujuan Nasional di dalam Pembukaan UUD 1945 haruslah dikembangkan menjadi wahana pendidikan kesadaran kehidupan kewarganegaraan dan pendidikan yang kritis untuk memberdayakan setiap warga negara. Untuk memenuhi harapan tersebut seyogyanya Pendidikan Kewarganegaraan secara bersamaan dapat menjadi wahana pendidikan untuk mensosialisasikan dan sekaligus melakukan countersosialisasi yang kritis terhadap

kehidupan sosial budaya politik kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tuntutan persamaan gender.

Menjadikan peserta didik yang kritis dan reflektif adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab, memiliki komitmen yang tinggi, dan memiliki kompetensi untuk turut berpartisipasi aktif secara sosial politik dalam memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini membutuhkan warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civics knowledge*) yang luas dan mendalam; nilai-nilai dan sikap kewarganegaraan (*civics values*) yang positif dan penuh tanggung jawab; dan memiliki keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) yang bermakna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Di samping itu, ketiga kapabilitas kewarganegaraan ini haruslah juga diintegrasikan oleh *civic confidence*, *civic commitment*, dan *civic performance* untuk menjadi kompetensi kewarganegaraan (*civics competence*) dan budaya kewarganegaraan (*civics culture*) yang bermakna bagi kehidupan sosial budaya kemasyarakatan, kebangsaan dan ketatanegaraan (Winataputra, 2001:117)

Namun realitas pendidikan di Indonesia saat ini, PKn menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan. Dari segi instrumental input berkaitan dengan kualitas pendidik serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar. Segi masukan lingkungan (*environmental input*) terutama berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis (sebelum era reformasi) dan kehidupan masyarakat yang dihinggapi euforia kebebasan (pasca era reformasi). Hal ini berdampak kepada pelaksanaan pembelajaran PKn yang cenderung tidak

mengarah pada misi yang semestinya. Indikasi empirikal yang menunjukkan gejala ini dikutip Budimansyah (2008 :180), yaitu : 1) Proses pembelajaran PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (*instructional effects*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) yang lebih menekankan pada domain kognitifnya saja, 2) Pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa melalui pelibatangannya secara proaktif dan interaktif, sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*)

Indikasi-indikasi tersebut melukiskan begitu banyaknya kendala kurikuler dan sosio-kultural bagi PKn untuk menghasilkan suatu totalitas hasil belajar yang mencerminkan pencapaian secara komprehensif (menyeluruh) tentang dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik yang koheren dan konfluen. Hasil belajar PKn yang belum mencapai keseluruhan dimensi secara optimal seperti digagaskan itu berarti menunjukkan bahwa tujuan kurikuler PKn belum dapat dicapai sepenuhnya.

Pencapaian keseluruhan dimensi secara optimal itu diperlukan upaya yang terintegrasi dan sinergi antar berbagai elemen yang menunjang pendidikan, agar pembelajaran yang holistik bisa melahirkan seorang warganegara yang mumpuni dengan multi dimensi baik kepribadian, sosial, spasial ataupun temporal dengan konsep pengembangan potensi individu. Individu yang '*think globally, action locally*'. Sehingga berpeluang melahirkan warganegara yang responsif terhadap

pengembangan bangsa dan negaranya terutama dalam membangun kesadaran persamaan gender..

Untuk keberhasilan pendidikan demokrasi seperti di atas, diperlukan kondisi berkembangnya kultur demokrasi. Ditegaskan Winataputra dan Budimansyah (2007:220) bahwa secara teoritik di Indonesia diperlukan pengembangan konsep *civic culture* atau budaya Pancasila karena sangat erat kaitannya dengan perkembangan *democratic civil society* atau masyarakat madani Pancasila sebagai masyarakat sipil yang demokratis.

Inilah fungsi peran pendidikan demokrasi agar mampu mengembangkan akhlak kewarganegaraan yang dalam kurun waktu bersamaan mampu memberikan kontribusi terhadap berkembangnya budaya kewarganegaraan yang menjadi inti dari masyarakat madani. Inilah tantangan konseptual dan operasional bagi pendidikan dalam berbagai bentuk dan latar (*multidimensi*) kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi (Winataputra dan Budimansyah, 2007:225).

Gagasan pencapaian pendidikan demokrasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan ini diperlukan profil konseptual kelas pendidikan kewarganegaraan yang semula dominatif dan indoktrinatif mengarah menjadi integratif dan analitik. Untuk itu diperlukan proses pembelajaran yang memberdayakan siswa untuk berpikir kritis dalam pemecahan masalah atau '*critical thinking oriented and problem solving oriented models*'. Model ini melibatkan siswa melalui 'proyek belajar', yaitu suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui pengalaman belajar praktik empirik (Boediono dalam Budimansyah,

2003:3). Model ini menjembatani kesenjangan antara kontroversi atau paradoksal teori yang dipelajari di sekolah dengan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk mewujudkan misi sosio-akademis PKn dalam menumbuhkembangkan kompetensi siswa dalam aspek kecakapan akademis, terutama dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis analitis, reaktif, reflektif, menemukan sendiri pemecahan masalah dan bahkan mengembangkan pengetahuannya secara mandiri dan bertanggungjawab yang berkaitan dengan pengembangan kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka diperlukan pembelajaran yang berorientasi terhadap praktik kewarganegaraan agar harapan pengembangan kompetensi kewarganegaraan dengan membangun *mind set* siswa yang memiliki wawasan persamaan gender dapat tercapai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tentang Pengaruh Pembelajaran Model *Project Citizen* terhadap pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan siswa SMA, maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh pembelajaran model *Project Citizen* terhadap pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan (*Civic Competences*) siswa SMA dalam materi pemahaman persamaan gender”

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pembelajaran model *project citizen* terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan siswa SMA baik *aspek civic knowledge, civic skill* maupun *civic dispositions* dalam materi pemahaman persamaan gender ?
2. Apakah terdapat pengaruh pembelajaran model *project citizen* terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan siswa SMA dalam aspek *civic knowledge* dalam materi pemahaman persamaan gender?
3. Apakah terdapat pengaruh pembelajaran model *project citizen* terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan siswa SMA dalam aspek *civic skill* dalam materi pemahaman persamaan gender?
4. Apakah terdapat pengaruh pembelajaran model *project citizen* terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan siswa SMA dalam *aspek civic dispositions* dalam materi pemahaman persamaan gender?
5. Apakah terdapat perbedaan dalam pengembangan *civic competence* baik aspek *civic knowledge, civic skill* maupun *civic dispositions* antara kelas eksperimen yang mempergunakan pembelajaran PKn model *project citizen* dengan kelas kontrol ?
6. Apakah terdapat perbedaan pengembangan *civic knowledges* antara kelas eksperimen yang mempergunakan pembelajaran PKn model *project citizen* dengan kelas kontrol ?

7. Apakah terdapat perbedaan dalam pengembangan *civic skills* antara kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran PKn model *project citizen* dengan kelas kontrol ?
8. Apakah terdapat perbedaan dalam pengembangan *civic dispositions* antara kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran PKn model *project citizen* dengan kelas kontrol ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai 'Pengaruh pembelajaran model *project citizen* terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan siswa SMA dalam materi pemahaman persamaan gender' ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh pembelajaran model *project citizen* terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan siswa SMA baik aspek *civic knowledge*, *civic skill* maupun *civic dispositions* dalam materi pemahaman persamaan gender.
2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh pembelajaran model *project citizen* terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan siswa SMA dalam aspek *civic knowledge* dalam materi pemahaman persamaan gender.
3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh pembelajaran model *project citizen* terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan siswa SMA dalam aspek *civic skill* dalam materi pemahaman persamaan gender.

4. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh pembelajaran model *project citizen* terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan siswa SMA dalam aspek *civic dispositions* dalam materi pemahaman persamaan gender.
5. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan dalam pengembangan *civic competence* baik aspek *civic knowledge*, *civic skill* maupun *civic dispositions* dalam materi pemahaman persamaan gender antara kelas eksperimen yang mempergunakan pembelajaran PKn model *project citizen* dengan kelas kontrol
6. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan dalam pengembangan *civic knowledges* dalam materi pemahaman persamaan gender antara kelas eksperimen yang mempergunakan pembelajaran PKn model *project citizen* dengan kelas kontrol.
7. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan dalam pengembangan *civic skills* dalam materi pemahaman persamaan gender antara kelas eksperimen yang mempergunakan pembelajaran PKn model *project citizen* dengan kelas kontrol.
8. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan dalam pengembangan *civic dispositions* dalam materi pemahaman persamaan gender antara kelas eksperimen yang mempergunakan pembelajaran PKn model *project citizen* dengan kelas kontrol.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi: *Pertama*, Pengaruh yang menurut Kamus Bahasa Indonesia (Wojowasito, 1972:216) mengandung makna “daya kekuatan dari suatu keadaan atau dapat mendatangkan”; *Kedua*, Pembelajaran Model *Project Citizen*, yaitu suatu strategi instruksional atau proses belajar mengajar di sekolah yang didesain untuk membina dan mengembangkan warga negara yang cerdas, mampu dan mendidik para peserta didik agar mampu untuk menganalisis berbagai dimensi kebijakan publik, kemudian dengan kapasitasnya sebagai “*young citizen*” atau warga negara yang “cerdas, kreatif, partisipatif, prospektif, dan bertanggung jawab”, agar mampu memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya; *Ketiga*, Pengembangan yaitu “menjadi besar atau menjadi bertambah besar atau ada kemajuan”(Wojowasito, 1972:135); dan *keempat*, yaitu Kemampuan Kewarganegaraan (dalam pembahasan selanjutnya penulis menyebutnya dengan istilah *civic competence*), adalah serangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran siswa di sekolah yang dapat diidentifikasi ke dalam tiga aspek, yaitu aspek *kognitif* (pengetahuan kewarganegaraan atau *civic knowledge*), meliputi: 1) Pemahaman HAM, 2) Pemahaman Demokrasi, 3) Pemahaman Konstitusional, 4) Pemahaman tentang Keterwakilan Perempuan, 5) Pemahaman masalah sosial budaya, 6) Pemahaman masalah politik. Aspek *Afektif* (watak/kebiasaan/karakter kewarganegaraan atau *civic dispositions*) dan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah karakter publik warganegara yang meliputi: 1) kecenderungan watak siswa tentang pemahaman peran tugas perempuan dalam keluarga, 2) kecenderungan

watak siswa dalam pemahaman perempuan dan karier, 3) kecenderungan watak siswa dalam pemahaman perempuan mandiri. Aspek *priskomotorik* (ketrampilan/kecakapan kewarganegaraan atau *civic skill*) yang meliputi: 1) Intelektual skill, yang terdiri (a) kecakapan berpikir kritis, (2) kecakapan mendeskripsikan serta (3) kecakapan menjelaskan dan menganalisis, dan 2) Partisipatoris skill yang terdiri dari (a) *Interacting*, (b) *Monitoring* dan (3) *Influencing*.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu Pembelajaran Model *Project Citizen* sebagai variabel bebas (X) dan Kompetensi Kewarganegaraan (*Civic Competence*) sebagai variabel terikat (Y).

1. Pembelajaran PKn Model *Project Citizen* (variabel bebas atau 'X')

Pembelajaran model praktik belajar kewarganegaraan merupakan strategi instruksional yang mengadopsi pola belajar model '*project*' ala John Dewey yang berpangkal tolak dari strategi '*Inquiry Learning, Discovery learning, Problem Solving Learning, Research-Oriented Learning*, dengan langkah-langkah :

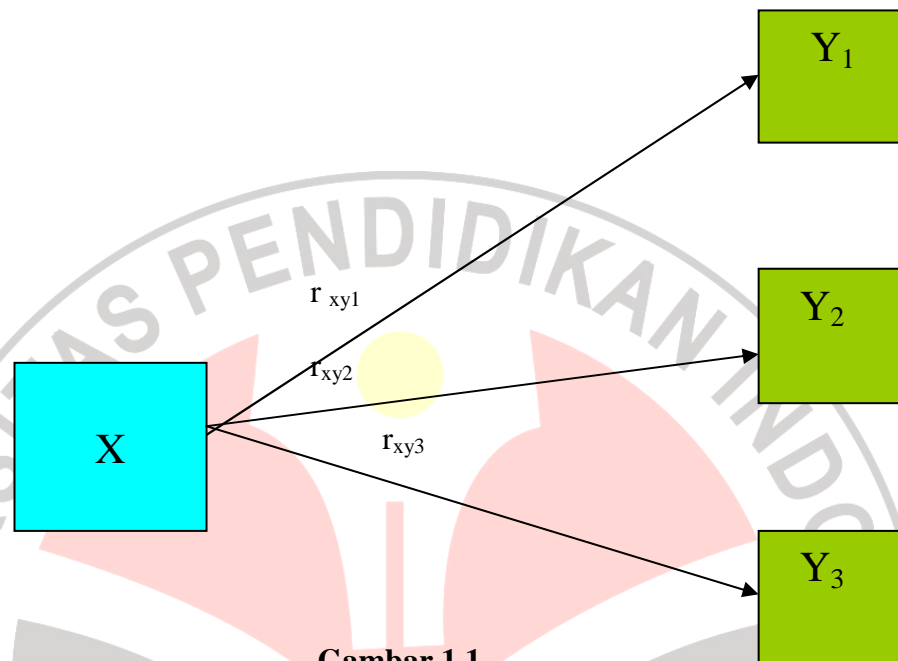
- a) Mengidentifikasi masalah kebijakan publik dalam masyarakat
- b) Memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas
- c) Mengumpulkan informasi yang terkait pada masalah itu
- d) Mengembangkan Portofolio kelas
- e) Menyajikan Portofolio
- f) Melakukan refleksi pengalaman belajar

2. Kompetensi Kewarganegaraan (*Civic Competences*) (variabel terikat atau 'Y')

Kompetensi kewarganegaraan adalah pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan siswa yang mendukungnya menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *The National Standards for Civics and Government (Center for Civic Education, 1994 dalam Winataputra&Budimansyah, 2008:186)* merumuskan komponen-komponen utama *civic competences* yang merupakan tujuan *civic education* meliputi :

- b. Pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*) sebagai Y_1
- c. Kecakapan Kewarganegaraan (*civic skill*) sebagai Y_2
- d. Watak Kewarganegaraan (*civic dispositions*) sebagai Y_3

Keterkaitan Variabel Bebas dan Variabel Terikat, yaitu sebagai berikut :



Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Variabel

Keterangan :

X : Pembelajaran *Project Citizen*

Y : Kompetensi Kewarganegaraan terhadap pemahaman persamaan gender

Y₁: *Civic Knowledge*

Y₂: *Civic Skill*

Y₃: *Civic Disposition*

r_{xy} : Pengaruh *project citizen* terhadap *civic competence*

r_{xy1} : Pengaruh *project citizen* terhadap aspek *civic knowledge*

r_{xy2} : Pengaruh *project citizen* terhadap aspek *civic skill*

r_{xy3} : Pengaruh *project citizen* terhadap aspek *civic disposition*

Adapun Rincian definisi operasional variabel penelitian disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur	Sumber Data	Nomor Option
1	2	3	4	5	6
Pembelajaran Model <i>Project Citizen</i> (X)	1. Pelaksanaan Langkah-langkah Pembelajaran <i>Project Citizen</i>	1.1 Identifikasi Masalah Kebijakan Publik dalam Masyarakat 1.2 Memilih suatu Permasalahan 1.3 Mengumpulkan Informasi 1.4 Mengembangkan Portofolio Kelas 1.5 Menyajikan Portofolio Kelas (<i>Show-Case/Simulated Hearing Public</i>) 1.6 Refleksi	Skala Semantik Differensia 1. Model Guttman dengan alternatif jawaban dari yang paling positif sampai pada yang paling negatif dengan skala 5-4-3-2-1	Siswa	1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30
Kompetensi Kewarga negaraan dalam materi pemahaman persamaan gender (Y)	1. <i>Civic Knowledge</i> (Y ₁)	1.1 Pemahaman HAM 1.2 Pemahaman Demokrasi 1.3 Pemahaman Konstitusional 1.4 Pemahaman tentang Keterwakilan Perempuan 1.5 Pemahaman Masalah sosial budaya 1.6 Pemahaman Masalah politik	Tes Pilihan Ganda (PG) yang terstandar	Siswa	1-4 5-8 9-12 13-15 16-18 19-20
	2. <i>Civic Skill</i> (Y ₂)	2.1 Intelektual Skill 2.1.1 kecakapan berpikir kritis 2.1.2 kecakapan kemampuan mendeskripsikan 2.1.3 kecakapan menjelaskan dan menganalisis 2.2 Partisipatoris Skill	Skala Semantik Diferensial dari Osgood, dengan 5 skala	Siswa	21-23 24-26 27-30

		2.2.1 <i>interacting</i> 2.2.2 <i>monitoring</i> 2.2.3 <i>influencing</i>	SS = 5 SS = 4 S = 3 TS = 2 STS = 1 dan berlaku terbalik jika pernyataan nya negatif		31-33 34-37 38-40
	3. <i>Civic Disposition</i> (Y ₃)	3.1 Karakter publik 3.1.1 Kecenderungan pemahaman siswa tentang peran dan tugas perempuan dalam keluarga 3.1.2 Kecenderungan pemahaman siswa tentang perempuan dan karier 3.1.3 Kecenderungan pemahaman siswa tentang pengembangan peran perempuan mandiri	Skala Sikap dari Likert dengan 5 skala bertingkat : SS = 5 S = 4 CS = 3 KS = 2 STS = 1 dan berlaku terbalik jika pernyataan nya negatif	Siswa	41-45 46-59 60-70

E. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

Signifikansi dan manfaat penelitian ini, adalah :

1. Secara Teoretis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya aplikasi pembelajaran model *project citizen* terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan siswa SMA dalam materi pemahaman persamaan gender yang merupakan sebuah inovasi intruksional yang berorientasi terhadap *public adaptif*, agar siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman, pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, pengembangan karakter dan sikap

mental serta komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional terutama dalam hal ini membangun kesadaran dan *mind set* siswa tentang pola pikir pemahaman persamaan gender.

2. Secara Praktis

- a. *Bagi Guru*, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam mengaplikasikan pembelajaran model *project citizen* terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan siswa SMA dalam materi pemahaman persamaan gender
- b. *Bagi Siswa*, diharapkan dapat memberikan motivasi dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan tentang pemahaman persamaan gender melalui efektivitas aplikasi pembelajaran model *project citizen*.
- c. *Bagi penulis*, dapat menambah wawasan penelitian dalam memahami strategi-strategi pembelajaran PKn model *project citizen* sehingga dapat diaplikasikan dalam kegiatan mengajar dan pembelajarannya.

F. Asumsi Penelitian dan Hipotesis Penelitian

1. Asumsi

Sebagai pangkal tolak pemikiran dalam penelitian ini, penulis merasa perlu mengemukakan anggapan dasar. Adapun anggapan dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan Kewarganegaraan kaya akan nilai jika para siswa ikut ambil bagian secara aktif dalam kehidupan politik dan berwarga negara. (Branson yang dikutip Budimansyah, 2007:182).
- b. Agar pembelajaran PKn bermakna mesti ditunjang oleh berbagai strategi belajar yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah sosial yang bertujuan memfasilitasi siswa untuk menjadi warga negara yang dewasa. (Djunaedi, 2007:91)
- c. Para siswa yang dilibatkan dalam pembelajaran secara langsung, akan lebih antusias dan bersemangat. (Rusyan, 2002:127)
- d. Pembelajaran model *project citizen* adalah suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui pengalaman belajar praktik empirik. Dalam hal ini pelajaran merupakan program pendidikan yang mendorong kompetensi, tanggung jawab dan partisipasi peserta didik khususnya dalam belajar menilai dan mempengaruhi kebijakan umum (*public policy*), memberanikan diri untuk berperan serta dalam kegiatan antar siswa, sekolah maupun anggota masyarakat. (Budimansyah, 2009:1)
- e. Pembelajaran model *project citizen* merupakan pembelajaran dengan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang bersoko guru pada aktivitas belajar siswa kadar tinggi dan multi domain serta multi dimensional, proses ajar utuh terpadu, interdisipliner, akan memberdayakan kesempatan pelatihan pelakonan berbagai kegiatan dan kemahiran siswa menjadi warga masyarakat serta anak

bangsa yang baik, demokratis, cerdas, dan berbudaya Indonesia termasuk di dalamnya materi pemahaman persamaan gender (Djahiri, 2001:1)

Merujuk pada asumsi penelitian di atas, kiranya dapat dipaparkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

2. Hipotesis Penelitian

a. Hipotesis Mayor

Terdapat perbedaan terhadap pengembangan *civic competences* siswa dalam materi pemahaman persamaan gender antara kelas eksperimen yang mempergunakan pembelajaran PKn model *project citizen* dengan kelas kontrol yang mempergunakan pembelajaran konvensional.

b. Hipotesis Minor

- 1) Terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran dengan model *project citizen* terhadap pengembangan *civic competence* baik dalam aspek *civic knowledge, civic skill dan civic disposition* pada materi pemahaman persamaan gender.
- 2) Terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran dengan model *project citizen* terhadap pengembangan *civic competence dalam aspek civic knowledge* pada materi pemahaman persamaan gender.
- 3) Terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran dengan model *project citizen* terhadap pengembangan *civic competence* dalam aspek *civic skill* pada materi pemahaman persamaan gender.

- 4) Terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran dengan model *project citizen* terhadap pengembangan *civic competence* dalam aspek *civic disposition* pada materi pemahaman persamaan gender.
- 5) Terdapat perbedaan yang signifikan pengembangan *civic competence* baik *civic knowledge*, *civic skill* maupun *civic dispositions* dalam materi pemahaman persamaan gender antara kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran model *project citizen* dengan kelas kontrol.
- 6) Terdapat perbedaan yang signifikan pengembangan *civic knowledge* dalam materi pemahaman persamaan gender antara kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran model *project citizen* dengan kelas kontrol.
- 7) Terdapat perbedaan yang signifikan pengembangan *civic skill* dalam materi pemahaman persamaan gender antara kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran model *project citizen* dengan kelas kontrol.
- 8) Terdapat perbedaan yang signifikan pengembangan *civic dispositions* dalam materi pemahaman persamaan gender antara kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran model *project citizen* dengan kelas kontrol.

G. Kerangka Pemikiran

